

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI KELAS II
PERIODE TRIWULAN III
1 JULI 2024 s/d 30 SEPTEMBER 2024

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI KELAS II

Jalan Jaksa Agung Suprpto, Kelurahan Mulya Agung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin

Telp. (0711) 5720800

Email : pn.pangkalanbalai@gmail.com

Website : pn-pangkalanbalai.go.id

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
TERHADAP PELAYANAN PADA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Triwulan III Periode Tanggal 1 Juli 2024 s.d. 30 September 2024

Disahkan di Pangkalan Balai
Pada hari Selasa, 01 Oktober 2024



Panitera Muda Hukum


A. HAIRUN YULASNI, S.H., M.H.
NIP. 197007251990031001

Panitera


WARNO, S.H.
NIP. 196709041991031002

Mengetahui.
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai


NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.
NIP. 197811252002122002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusunnya Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Triwulan III Periode Tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 30 September 2024 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas.

Survei Persepsi Anti Korupsi bertujuan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Pengadilan Negeri Palembang dan mendorong Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip transparan, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, keadilan dan netralitas kepada masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Semoga laporan survei ini bermanfaat untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, agar segera memperbaiki pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Pengadilan.



Ketua Tim,



WARNO, S.H.
NIP. 196709041991031002

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I	1
KUISIONER SURVEI.....	1
A. Daftar Pertanyaan / Kuesioner.....	1
B. Bentuk Jawaban.....	1
BAB II.....	2
METODOLOGISURVEI.....	2
A. Kriteria Responden.....	2
B. Metode Pencacahan.....	2
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis.....	2
BAB III.....	4
PENGOLAHAN SURVEI.....	4
A. Analisis Hasil Survei.....	4
B. Tindak Lanjut Hasil Survei.....	11
BAB IV.....	13
DATA SURVEI.....	13
A. Data Responden.....	13
B. Data Dukung Lainnya.....	15

BAB I

KUESIONER SURVEI

A. Daftar Pertanyaan/Kuesioner

Daftar pertanyaan/kuisisioner sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Aplikasi SISUPER sebagaimana di bawah ini:

- 1) Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?
- 2) Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?
- 3) Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?
- 4) Apakah tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini ?
- 5) Apakah tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini ?

Pengisian kuisisioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan, pengeculian jika responden termasuk difabel maka dapat dibantu oleh surveyor seperti Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Untuk melaksanakan survei, dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan alamat: bit.ly/sisuperpnpkb

B. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dari setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuisisioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan ganda. Bentuk pilihan jawaban kuisisioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan.

Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
- 2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
- 3) baik, diberi nilai 3;
- 4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Survei dilakukan kepada seluruh penerima layanan yang telah selesai menerima pelayanan dari unit/satuan kerja. Penerima pelayanan adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik.

B. Metode Pencacahan

Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan data, pengolahan, penyajian dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan masyarakat. Di dalam melaksanakan pengumpulan data, maka metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan data adalah swacacah (responden mengisi kuesioner sendiri). Responden dalam survei ini adalah penerima layanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan atau yang pernah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan. Pencacahan survey SPAK ini mulai dilaksanakan tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 30 September 2024.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Metode penelitian survei adalah cara melakukan pengumpulan data berdasarkan survei. Pengertian survei adalah sebuah teknik riset atau penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dengan memberi batas yang jelas atas data kepada suatu obyek tertentu. Orang yang melakukan survei disebut penyurvei. Melakukan survei berarti melakukan penyelidikan, pemeriksaan atau peninjauan terhadap obyek tertentu untuk mendapatkan data bagi keperluan tujuan penelitian. Survei dalam hal ini dengan menggunakan kuesioner

sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data, dan lain sebagainya, agar hasil yang dicapai secara sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak dimulainya

... ..

informasi yang umumnya disertai dengan gambar, angka, tabel, grafik, dan lain sebagainya.

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi anti korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani. Kategori mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 1.
Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 2.5996	25 – 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644 -3.532	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

Nilai unsur dari Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai berikut:

1. Unsur Tindakan Diskriminasi (U1)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Tindakan Diskriminasi ini menunjukkan hasil analisis perolehan 88 (98,88%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Seluruh petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“3,966”** dimana berada pada nilai interval **3,5324-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai **“Bersih dari Korupsi”**.

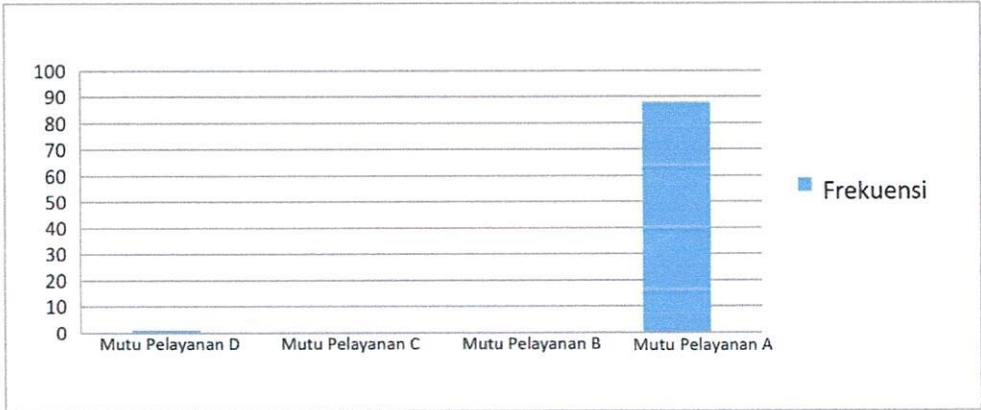
Tabel 2.
Unsur Tindakan Diskriminasi (U1)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1	A	Seluruh petugas pada pengadilan Tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya	4	88	98,88%
2	B	Sebagian besar Petugas pada Pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara Khusus atau membedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan	3	-	-

3	C	Sebagian kecil Petugas pada Pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya	2	-	-
4	D	Seluruh petugas pada Pengadilan pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya	1	1	1,12%
Jumlah				89	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 1.
Unsur Tindakan Diskriminasi (U1)



2. Unsur Indikasi Kecurangan Pelayanan (U2)

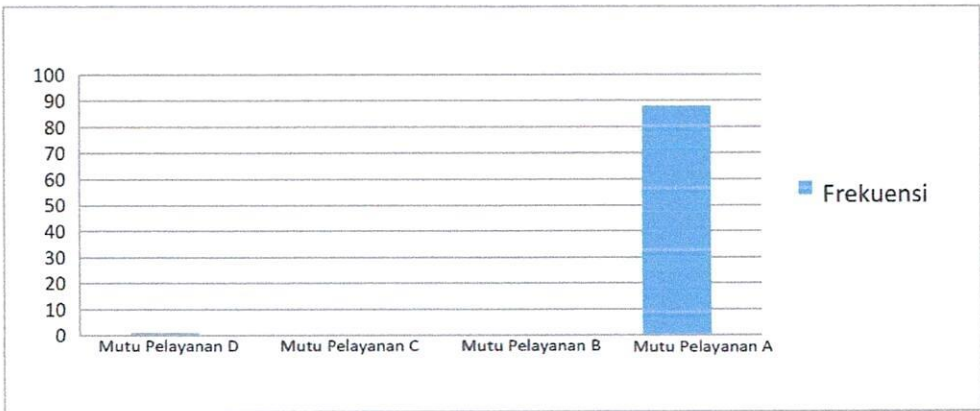
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Indikasi Kecurangan Pelayanan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 88 (98,88%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“3,966”** dimana berada pada nilai interval **3,5324-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan

Tabel 3.
Unsur Indikasi Kecurangan Pelayanan (U2)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	A	Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	4	88	98,88%
2.	B	Sebagian besar pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	3	1	0,58%
3.	C	Sebagian kecil pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	2	-	-
4.	D	Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas tidak sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	1	1	1,12%
Jumlah				89	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 2.
Unsur Indikasi Kecurangan Pelayanan (U2)



3. Unsur Pemberian Imbalan diluar Ketentuan yang berlaku (U3)

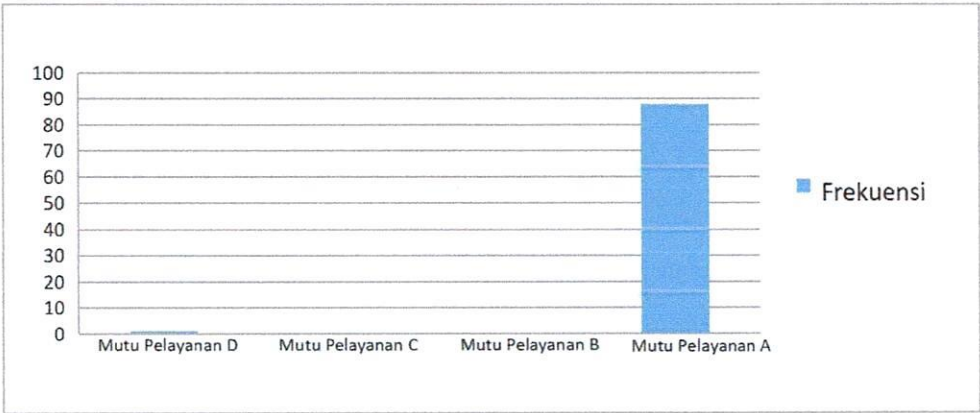
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Pemberian Imbalan diluar Ketentuan yang berlaku ini menunjukkan hasil analisis persentase 99 (99,00%) dari jumlah

menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan (A)” pada nilai rata-rata sebesar “3,966” dimana berada pada nilai interval 3,5324-4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai “Bersih dari Korupsi”.

Tabel 4.
Unsur Pemberian Imbalan diluar Ketentuan yang berlaku (U3)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	A	Petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang,barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	4	88	98,88%
2.	B	Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang,barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	3	-	-
3.	C	Petugas pelayanan sering menerima/bahkan meminta imbalan (uang,barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	2	-	-
4.	A	Petugas pelayanan selalu menerima/bahkan meminta imbalan (uang,barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	1	1	1,12%
Jumlah				89	100%

Gambar 3.
Unsur Pemberian Imbalan diluar Ketentuan yang berlaku (U3)



4. Unsur Praktik Pungutan Liar (U4)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Praktik Pungutan Liar ini menunjukkan hasil analisis perolehan 88 (98,88%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll) (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“3,966”** dimana berapa pada nilai interval **3,5324-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeksdapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai **“Bersih dari Korupsi”**.

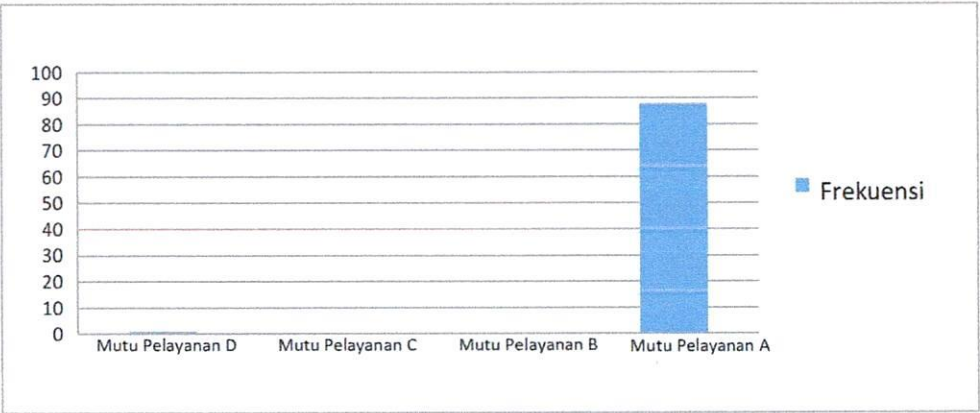
Tabel 5.
Unsur Praktik Pungutan Liar (U4)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	A	Petugas layanan Tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)	4	88	98,88%
2.	B	Sebagian besar Petugas layanan Tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi sepereti (uang	3	-	-

3.	C	Sebagian besar Petugas layanan sering meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)	2	-	-
4.	D	Sebagian besar petugas layanan selalu meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)	1	1	1,12%
Jumlah				89	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 4.
Unsur Praktik Pungutan Liar (U4)



5. Unsur Praktik Percaloan (U5)

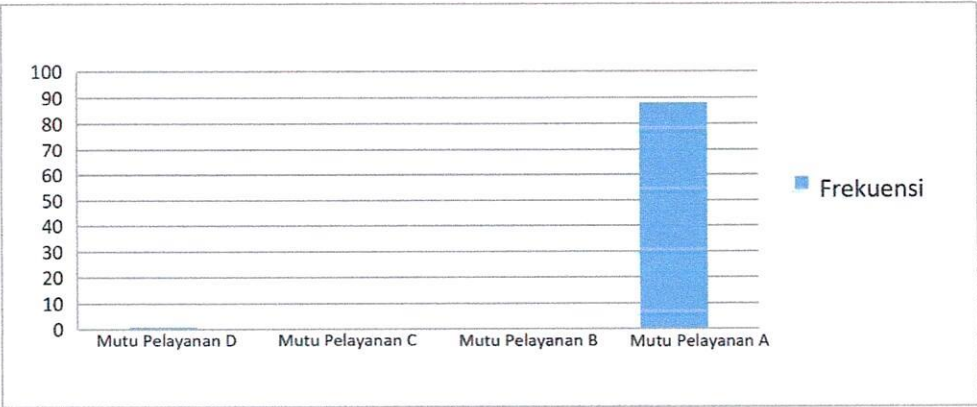
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Praktik Percaloan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 88 (98,88%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Seluruh petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“3,966”** dimana berada pada nilai interval **3,5324-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 6.
Unsur Praktik Percaloan (U5)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	A	Seluruh petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan	4	88	98,88%
2.	B	Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan	3	-	-
3.	C	Petugas pelayanan sering melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan	2	-	-
4.	D	Petugas pelayanan selalu melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan	1	1	1,12%
Jumlah				89	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 5.
Unsur Praktik Percaloan (U5)



rata- rata setiap unsur pelayanan. Hasil nilai rata-rata dan peringkat pada setiap unsur dari Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melalui aplikasiSISUPER sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.
Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja
padaPengadilan Negeri Pangkalan Balai

No.	Jenis Unsur	Jumlah	NilaiRata-Rata	Nilai Rata-rata Tertimbang	Peringkat
U1	Tindakan Diskriminasi	353	3,966	0,793	5
U2	Indikasi Kecurangan Pelayanan	353	3,966	0,793	4
U3	Pemberian Imbalan diluar ketentuan yang berlaku	353	3,966	0,793	3
U4	Praktik PungutanLiar	353	3,966	0,793	2
U5	Praktik Percaloan	353	3,966	0,793	1
Jumlah			20,000	2,0000	3,96
Nilai Indeks SPAK (%)			3,96 x 25 = 99,16%		

Dengan demikian, nilai Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai Indeks SPAK setelah dikonversi = Nilai Survei x Nilai Dasar
 = 3,96x 25 = 99,16%
- b. Mutu Pelayanan **A**
- c. Kinerja unit pelayanan **Sangat Baik**

Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi “**3,96/ 99,16%**” tersebut jika dikonversikan dalam tabel bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi, maka nilai indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai “**Bersih Dari Korupsi**” jika mengacu kepada nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi antara **3,5324-4,00** dengan konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi angka “**88.31-100,00**”.

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur terendah harus dilakukan monitoring dan evaluasi untuk

Balai kepada responden kedepannya yang disertai dengan tindak lanjut terhadap monitoring dan evaluasi tersebut, sedangkan unsur yang mempunyai nilai tertinggi harus tetap dipertahankan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tindak lanjut dari 3 (tiga) nilai terendah adalah sebagai berikut:

Tabel 8.
Tindak Lanjut Atas 3 (Tiga) Nilai Terendah Hasil Indeks Persepsi
Anti Korupsi Periode Juli - September 2043

No.	INDIKATOR	TINDAK LANJUT
1	Responden (U1)	Telah tersedia informasi pelayanan pada website dan standar pelayanan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
2	Responden (U2)	Pengoptimalan pengawasan melalui CCTV di Lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
3	Responden (U3)	Telah terdapat prosedur perkara dan informasi pada website Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Dari monitoring dan evaluasi hasil Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merujuk pada hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Periode 1 Juli 2024 sampai dengan 30 September 2024 yaitu **3,96 / 99,16%** berada pada kategori Sangat Baik. Oleh karena itu, capaian yang telah didapatkan harus tetap dipertahankan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat terus ditingkatkan. Diharapkan kepada Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk selalu mengarahkan masyarakat untuk mengisi survei yang ada pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan Pimpinan tetap melakukan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan pada unit layanan Pengadilan guna meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas kepada masyarakat.

BAB IV DATA SURVEI

A. Data Responden

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data jenis kelamin responden pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai berikut:

Tabel 9.

Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	70	78,65%
2	Perempuan	19	21,35%
Jumlah		89	100%

2. Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data tingkat pendidikan responden pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai berikut:

Tabel 10.

Tingkat Pendidikan Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sekolah	0	0,00%
2	SD	0	0,00%
3	SMP	0	0,00%
4	SMA	65	73,03%
5	Diploma 1	0	0,00%
6	Diploma 2	0	0,00%
7	Diploma 3	1	1,13%
8	S1	23	25,84%
9	S2	0	0,00%
10	S3	0	0,00%
Jumlah		89	100%

3. Pekerjaan Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data pekerjaan responden pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagaimana dalam tabel dibawah ini yaitu:

Tabel 11.
Jenis Pekerjaan Responden

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	3	3,37%
2	TNI	0	0,00%
3	POLRI	2	2,25%
4	Swasta	42	47,19%
5	Wirausaha	0	0,00%
6	Tenaga Kontrak	0	0,00%
7	Lainnya	42	47,19%
Jumlah		89	100%

4. Domisili Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data domisili responden pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai berikut:

Tabel 12.
Domisili Responden

No.	Domisili	Jumlah	Persentase
1	Sumatera Selatan	88	98,88%
2	Jambi	1	1,12
Jumlah		89	100%

5. Data Layanan

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data layanan yang diperoleh responden pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai berikut:

Tabel 13.
Jenis Layanan yang dipergunakan Responden

No.	Jenis Layanan	Frekuensi	Persentase
1	Pidana	3	3,70%
2	Perdata	2	2,25 %
3	Hukum / Informasi	23	25,84%
4	Adminstrasi Umum	54	60,67%
5	E-Court	7	7,87%
Jumlah		89	100%

6. Data Umur Responde

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data umur responden pada Pengadilan Negeri Palembang yaitu:

Tabel 14.
Usia Responden

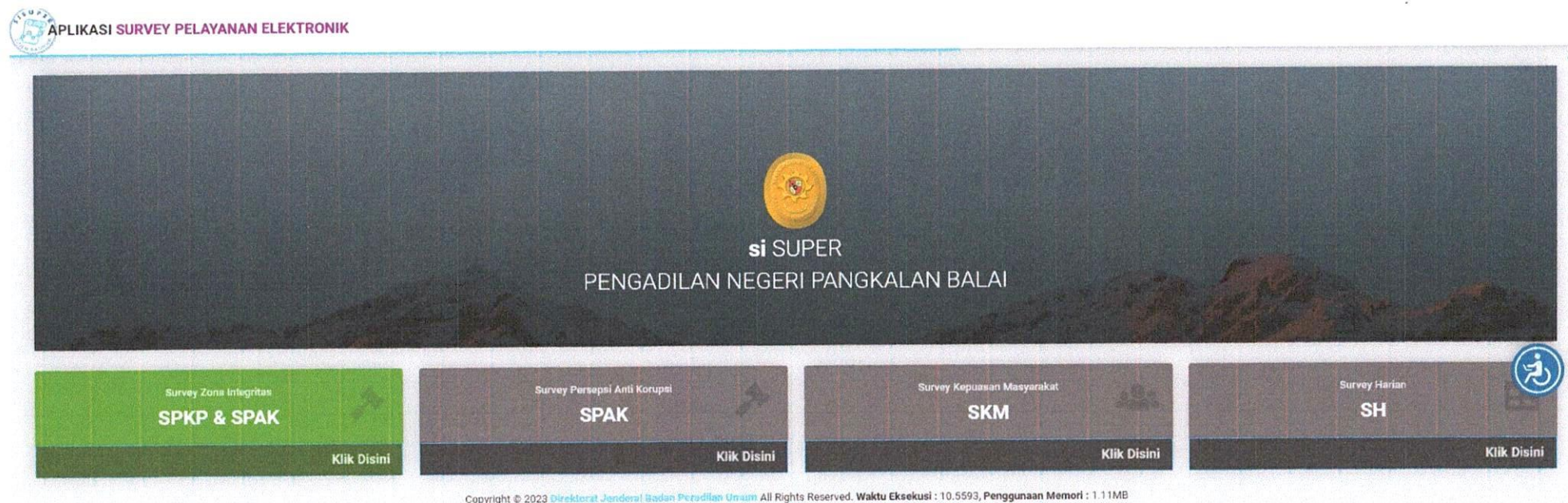
No.	Umur	Jumlah	Persentase
1	18 - 28 Tahun	17	19,10%
2	29 - 39 Tahun	48	53,93 %
3	40 - 49 Tahun	20	22,47%
4	50 - 59 Tahun	4	4,49%
5	60 - 69 Tahun	0	0,00%
Jumlah		89	100%

B. Data Dukung Lainnya

Untuk melaksanakan survei, dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan alamat: bit.ly/sisuperpnpcb

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 6.
Foto/Capture Screen Aplikasi Survei Online SISUPER





APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

Survey Zona Integritas | Survey Persepsi Anti Korupsi

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu BERDASARKAN SE MENPAN NOMOR 4 TAHUN 2023.

1 Data Responden
2 Layanan
3 Form Kuesioner
4 Kesan & pesan

Data Responden SPAK

Nama *
Eduan Eriandono Nidandono

Umur / Jenis Kelamin *
tahun
Pria, Jenis Kelamin

Nomor HP *
v62
082111112222

Domisili *
Pilih Wilayah

Pendidikan *
Pilih Pendidikan

Pekerjaan *
Pilih Pekerjaan

Kembali [Selesaikan](#)



APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

Survey Zona Integritas | Survey Persepsi Anti Korupsi

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu BERDASARKAN SE MENPAN NOMOR 4 TAHUN 2023.

1 Data Responden
2 Layanan
3 Form Kuesioner
4 Kesan & pesan

Layanan yang Anda dapatkan

Jenis Layanan *
Pilih Layanan Yang Didapat

Pernah Menerima Layanan Ini Sebelumnya ? *
Pilih Layanan Yang Didapat

Kembali [Selesaikan](#)



1 Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?

- Seluruh petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
- Sebagian besar petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
- Sebagian kecil petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
- Seluruh petugas pada pengadilan pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya

2 Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?

- Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
- Sebagian besar pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
- Sebagian kecil pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
- Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas tidak sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

3 Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?

- Petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
- Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

3 Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?

- Petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
- Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
- Petugas pelayanan sering menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
- Petugas pelayanan selalu menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

4 Apakah tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini ?

- Petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)
- Sebagian besar petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)
- Sebagian besar petugas layanan sering meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)
- Sebagian besar petugas layanan selalu meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)

5 Apakah tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini ?

- Seluruh petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan
- Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan
- Petugas pelayanan sering melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan
- Petugas pelayanan selalu melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan

Survey Zona Integritas | Survey Persepsi Anti Korupsi

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu BERDASARKAN SE MENPAN NOMOR 4 TAHUN 2023

Data Responden
Nama serta data responden

Layanan
Tipe layanan

Form Kuesioner
Isian form kuesioner SPKK

Wawasan & pesan
Melaporkan kesan dan pesan Anda

Mohon untuk mengisi kesan dan pesan Anda untuk meningkatkan pelayanan kami di masa

HASIL SURVEY IPAK TRIWULAN III PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur
ZI - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI NILAI INDEKS 3,97 / 99,16 % Periode 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024	JUMLAH	89 RESPONDEN			
	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 70 ORANG			
		PEREMPUAN : 19 ORANG			
	PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG			
		Diploma 2 : 0 ORG			
		SD : 0 ORG			
		Diploma 3 : 1 ORG			
		SMP : 0 ORG			
		S1 : 23 ORG			
		SMU : 65 ORG			
		S2 : 0 ORG			
		Diploma 1 : 0 ORG			
		S3 : 0 ORG			
	PEKERJAAN	PNS : 3 ORG			
		SWASTA : 42 ORG			
		TNI : 0 ORG			
		WIRAUSAHA : 0 ORG			
		POLRI : 2 ORG			
		TENAGA KONTRAK : 0 ORG			
		LAINNYA : 42 ORG			

DATA UMUR RESPONDER IPAK TRIWULAN III DARI APLIKASI SISUPER

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur				
Deskripsi			Jumlah (Orang)				% (Persen)		
18 - 28 Th			17				19,10		
29 - 39 Th			48				53,93		
40 - 49 Th			20				22,47		
50 - 59 Th			4				4,49		
60 - 69 Th			0				0,00		
Total			89						

DATA NILAI PER UNSUR IPAK TRIWULAN III DARI APLIKASI SISUPER

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur				
Deskripsi			U1	U2	U3	U4	U5	Keterangan	
Jumlah			353	353	353	353	353		
NRR Per RL			3,966	3,966	3,966	3,966	3,966	19,831	
NRR Tertimbang			0,793	0,793	0,793	0,793	0,793	3,966	
IPAK ZI Unit Pelayanan								99,16	

DATA LAYANAN

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur				
Layanan							Jumlah (Orang)		
1	Layanan Pidana						3		
2	Layanan Perdata						2		
3	Layanan Hukum / Informasi						23		
4	Layanan Administrasi Umum						54		
5	Layanan e-Court						7		

TIGA UNSUR TERENDAH

EVALUASI NILAI UNSUR		
3 Unsur Terendah		3 Unsur Tertinggi
No.	Unsur	Nilai
1	Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?	353
2	Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?	353
3	Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?	353

TIGA UNSUR TERTINGGI

EVALUASI NILAI UNSUR		
3 Unsur Terendah		3 Unsur Tertinggi
No.	Unsur	Nilai
1	Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?	353
2	Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?	353
3	Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?	353